

Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan Umkm di Kota Pekanbaru

Fiko Fernando

Universitas Riau

fikofernando4508@student.unri.ac.id

Khairul Amri

Universitas Riau

khairul.amri@lecturer.unri.ac.id

Korespondensi penulis : khairul.amri@lecturer.unri.ac.id

Abstract. *The background of this research is that some micro business actors have been out of business due to the pandemic, and only a small number of micro business actors have been empowered by the Pekanbaru City Cooperatives (diskop) and UMKM Office. This study aims to: (1) find out how the empowerment of micro-enterprises by Diskop and UMKM in Pekanbaru City; and (2) knowing the factors that influence the empowerment of micro business actors by Pekanbaru's Diskop and UMKM. This type of research is qualitative research. There were six informants in this study, and one key informant. The results of this study are: (1) the empowerment of micro-entrepreneurs by the Diskop and UMKM in Pekanbaru City has fulfilled the aspects of good empowerment, because there are already aspects of enabling, empowering, and protecting. The enabling aspect is known from the efforts to collect data on the potential of micro-entrepreneurs. Then the empowering aspect is known from the activities of forming business partnerships, empowering business institutions, coordinating and synchronizing micro business actors with regional stakeholders. Meanwhile, the aspect of protecting is protecting micro-enterprises from adverse events resulting from medium and large business actors through legal protection and advocacy assistance; (2) the empowerment of micro business actors by the Diskop and UMKM in Pekanbaru City is known from two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are factors originating from the Pekanbaru City Diskop and UMKM, such as the limited budget for empowering micro-entrepreneurs. External factors are related to micro business actors, such as the desire to be empowered but not empowered by the Office. In addition, there are some micro business actors who do not support empowerment activities carried out by the office, because they are considered to be less needed by micro business actors. The research suggestions are: (1) micro-entrepreneurs should be given socialization regarding the importance of participating in various empowerment programs by the Pekanbaru City Diskop and UMKM; (2) the importance of increasing the implementation budget for various micro business empowerment activities so that many micro business units can be empowered.*

Keywords : *Enabling, Empowering, Protect*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian para pelaku usaha mikro yang gulung tikar akibat pandemi, dan hanya sebagian kecil pelaku usaha mikro yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi (diskop) dan UMKM Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Diskop dan UMKM di Kota Pekanbaru; dan (2) mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberdayaan pelaku usaha mikro

oleh Diskop dan UMKM Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah enam orang, dan satu orang key informan. Hasil penelitian ini adalah: (1) pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Diskop dan UMKM di Kota Pekanbaru sudah memenuhi aspek pemberdayaan yang baik, karena sudah adanya aspek enabling, empowering, dan melindungi. Aspek enabling diketahui dari adanya upaya pendataan potensi pelaku usaha mikro. Kemudian aspek empowering diketahui dari adanya kegiatan membentuk kemitraan usaha, pemberdayaan kelembagaan usaha, koordinasi dan sinkronisasi para pelaku usaha mikro dengan para pemangku kepentingan daerah. Sedangkan aspek melindungi adalah dengan perlindungan usaha mikro dari hal-hal merugikan akibat para pelaku usaha menengah dan besar melalui perlindungan hukum dan bantuan advokasi; (2) faktor pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Diskop dan UMKM di Kota Pekanbaru diketahui dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru, seperti terbatasnya anggaran untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro. Faktor eksternal berkaitan dengan para pelaku usaha mikronya, seperti keinginan diberdayakan tetapi tidak diberdayakan oleh Dinas. Selain itu, terdapat sebagian para pelaku usaha mikro yang kurang mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas, karena dinilai kurang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro. Saran penelitian adalah: (1) hendaknya para pelaku usaha mikro diberikan sosialisasi mengenai pentingnya mengikuti berbagai program pemberdayaan oleh Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru; (2) pentingnya peningkatan anggaran pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan usaha mikro agar banyak unit usaha mikro yang dapat diberdayakan.

Kata Kunci : Enabling, Empowering, Melindungi

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan skala UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan dan mampu menguatkan pasar domestik dan berkeunggulan secara global. Hal itu diperkuat dengan adanya rencana strategis (renstra) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, yaitu meningkatkan skala UMKM. Jadi, UMKM tidak hanya tangguh dan mandiri, tetapi juga skalanya meningkat secara nasional maupun global. Namun kenyataan yang terjadi adalah tidak demikian dengan usaha mikro di Pekanbaru. Dimana jumlah unit usaha mikro di Kota Pekanbaru mengalami penurunan yang signifikan, khususnya wilayah Pekanbaru Kota.

jumlah usaha mikro yang terdata di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Hal itu terjadi akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021. Dimana jenis usaha kuliner / tata boga dari 257 unit usaha turun menjadi 204 unit usaha, walaupun naik sedikit menjadi 211 pada Tahun 2021. Kemudian jenis usaha fashion turun dari 46 unit usaha menjadi 23 unit usaha, jenis usaha laundry turun dari 25 unit usaha menjadi 11 unit usaha, jenis usah souvenir turun dari 10 unit usaha menjadi 3 unit usaha, dan

terjadi penurunan juga pada jenis usaha kedai harian, yaitu dari 300 unit usaha menjadi 232 unit usaha. Meskipun terjadi peningkatan pada jenis usaha kuliner pada Tahun 2021. Namun secara keseluruhan terjadi penurunan usaha mikro dari 638 unit usaha menjadi 480 unit usaha dari Tahun 2019-2021.

Kemudian dalam Pasal 10 Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tersebut dijelaskan juga dalam Pasal Ayat (3) bahwa “Khusus untuk usaha mikro, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.”

Dikatakan bahwa pemberdayaan usaha mikro tidak sama dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM hanya meliputi kegiatan pendataan, kemitraan (kerja sama dan bantuan modal), kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan (pelatihan- pelatihan) dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (berbagai pihak terkait).

Sedangkan kosep pemberdayaan menurut ahli mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Terkait dengan dengan pemahaman ini, pertama-pertama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Kemudian memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto & Soebito, 2019:35). Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah dikemukakan, bahwa pelaku usaha mikro belum memiliki keberdayaan sebagaimana harusnya. Sementara itu, pemberdayaan pelaku usaha mikro adalah tanggung jawab dan kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2018:56), bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.” Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2019:3), bahwa “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru

1. Enabling

Enabling dalam penelitian ini adalah memotivasi dan membangkitkan potensi pelaku usaha mikro, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana dikatakan Mardikanto & Soebiato (2019:44), bahwa pemberdayaan berupa enabling adalah dengan mendorong atau memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Terdapat 4 jenis pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, total anggarannya adalah Rp. 140,000,000., dimana anggaran terbesar adalah anggaran untuk pelatihan usaha mikro di Kota Pekanbaru, yaitu Rp. 65,000,000., dan selebihnya paling tinggi hanya Rp. 35,000,000. Dimana pengembangan usaha mikro hanya dilakukan pada 30 pelaku usaha mikro, dan kemitraan hanya pada 3 pelaku usaha mikro. Melalui Diketahui bahwa terdapat 480 (empat ratus delapan puluh) unit usaha mikro yang dapat didata oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru pada tahun 2021. Namun unit usaha mikro yang diberdayakan hanya 30 unit usaha saja, atau hanya 6,25% dari seluruh jumlah usaha mikro yang terdata. Artinya, realisasi untuk memberdayakan usaha mikro di Pekanbaru masih sangat rendah.

Alasan dipilihnya atau hanya diberdayakan 30 (tiga puluh) unit usaha dalam satu tahun (2021) adalah karena hanya 30 unit usaha tersebut yang dinilai berpotensi dan layak untuk diberdayakan. Disamping itu tentunya masih terbatasnya anggaran pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro di Kota Pekanbaru oleh Dinas Koperasi dan UMKM disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tiap tahunnya. Sehingga pelaku usaha mikro yang diberdayakan hanya pelaku usaha mikro terpilih,

yaitu pelaku usaha atau unit usaha mikro yang dinilai memiliki potensi dapat dikembangkan dan layak untuk diberdayakan menurut penilaian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

penelitian tentang membangkitkan dan mengembangkan potensi (enabling) usaha mikro yang penulis tanyakan kepada 5 (lima) orang pelaku usaha mikro di Pekanbaru (Lampiran 3), diperoleh kesimpulan hasil wawancara, bahwa tidak semua pelaku usaha mikro yang dikembangkan potensinya oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Para pelaku usaha mikro yang dikembangkan potensinya dalam bentuk pelatihan, penyuluhan atau pendampingan bagi para pelaku usaha mikro yang terpilih. Masyarakat tidak mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi agar menjadi unit usaha mikro yang terpilih dan dapat dikembangkan potensinya oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

2. Empowering

Empowering atau memberdayakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memperkuat pelaku usaha mikro dengan meningkatkan taraf pendidikannya, derajat kesehatannya, memberikan penguatan modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Sebagaimana dikatakan oleh Mardikanto & Soebiato (2019:44), bahwa empowering adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Derajat kesehatan dikaitkan dengan indikator empowering karena kesehatan penting untuk menghadapi berbagai hal secara fisik dan pikiran. Para pelaku usaha mikro yang sakit tentunya tidak akan mampu melaksanakan unit usahanya dengan baik. Oleh karena itu derajat kesehatan perlu diperhatikan, agar para pelaku usaha mikro tetap memiliki fisik dan pikiran yang sehat dalam mengelola unit usahanya secara positif tanpa gangguan berarti. Gangguan-gangguan secara fisik dan fikiran tentunya dapat mempengaruhi kelancaran dalam mengelola suatu unit usaha tertentu.

Tidak semua para pelaku usaha mikro memiliki modal yang cukup kuat, apalagi unit usaha mikro merupakan unit usaha terkecil dengan modal yang kurang stabil. Apalagi terjadi kondisi yang tidak dapat diprediksi dan mempengaruhi anggaran unit usaha mikro dalam menjalankan unit usahanya. Contohnya ketika terjadi wabah covid-

19. Oleh karena itu, sebagian unit usaha mikro membutuhkan bantuan modal, tentunya bantuan modal yang sesuai dan tidak memberatkan para pelaku usaha mikro.

Berdasarkan observasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru tidak memberikan sosialisasi bagi para pelaku usaha mikro mengenai pentingnya pemberdayaan, dan pentingnya pelatihan dan penyuluhan, pentingnya modal, teknologi, informasi dan pasar bagi pengembangan suatu unit usaha. Sehingga tidak semua para pelaku usaha mikro mengetahuinya dan membutuhkannya. Padahal kegiatan-kegiatan empowering sangat penting dalam memberdayakan para pelaku usaha mikro agar mandiri dan mampu mengembangkan unit usahanya menjadi lebih besar. Sehingga unit usaha yang dibangun dapat bertahan dalam berbagai situasi atau kondisi ekonomi maupun pasar, tujuan akhir pemberdayaan UMKM termasuk para pelaku usaha mikro adalah terciptanya unit usaha mikro yang tangguh dan mandiri. Tangguh menghadapi berbagai situasi, dan mandiri dalam berbagai hal terkait unit usahanya, baik itu dalam penyelenggaraannya maupun dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

3. Melindungi

Sebagaimana dikatakan Mardikanto & Soebiato (2019:44), bahwa perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eskploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru tidak memiliki bidang atau seksi khusus yang menangani permasalahan adanya persaingan yang tidak seimbang, serta eskploitasi yang kuat atas yang lemah antara unit UMKM, termasuk pada unit usaha mikro. Namun jika ada laporan dari masyarakat atau para pelaku UMKM, maka permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) dan pihak berwajib. Jika persaiangan yang tidak seimbang atau terjadinya eskploitasi tersebut dapat menyebabkan kerugian unit usaha mikro sebagai konsumen, maka dapat dikoordinasikan dengan lembaga dan bidang perlindungan konsumen.

Kemudian hasil wawancara penelitian dengan pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru terkait aspek melindungi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru

(Lampiran 5), diperoleh kesimpulannya bahwa para pelaku usaha mikro selama ini tidak pernah merasa atau belum pernah mengalami terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sehingga belum pernah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Dinas Koperasi dan UMKM dan pihak berwajib. Sementara dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru hanya menunggu laporan para pelaku UMKM jika terjadi kondisi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya melindungi dari Dins Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru hanya terjadi jika ada laporan dari pelaku usaha mikro.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru

1. Faktor Internal

Faktor internal terkait dengan faktor yang berada dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru itu sendiri. Faktor internal yang mendukung meliputi adanya program atau kegiatan terkait pemberdayaan pelaku usaha mikro, seperti pendataan potensi usaha mikro, kemitraan, kelembagaan dan pengembangan usaha mikro, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan terkait usaha mikro. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya ketersediaan anggaran untuk pemberdayaan para pelaku usaha mikro, karena jumlah usaha mikro yang didata dengan jumlah usaha mikro yang diberdayakan sangat jauh sekali (6.25%).

Sebagaimana pemberdayaan usaha mikro, bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan sesuai Perda

tersebut. Karena sudah ada kegiatan pendataan para pelaku usaha mikro dengan pencapaian 480 unit usaha mikro yang sudah terdata, kemudian adanya kemitraan bagi 3 unit usaha mikro, penguatan kelembagaan bagi 30 unit usaha mikro, dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan bagi 30 pelaku usaha mikro. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terhadap para pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan. Walaupun jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah unit usaha mikro yang terdata oleh Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Pekanbaru. Hal itu terjadi karena terbatasnya alokasi anggaran untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro.

Bentuk kegiatan pemberdayaan UMKM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut di atas tentunya sudah mendukung kegiatan pemberdayaan, khususnya terkait aspek empowering dan melindungi. Meskipun untuk unit usaha mikro dikhususkan pemberdayaannya pada aspek pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan berasal dari pelaku usaha mikro adalah berasal dari para pelaku usaha mikro itu sendiri. Faktor pendukungnya adalah adanya keinginan para pelaku untuk diberdayakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Namun hanya sebagian para pelaku usaha mikro yang terdata yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Faktor penghambatnya adalah tidak semua kegiatan pemberdayaan yang diadakan Dinas dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro, seperti pelatihan dan penyuluhan. Artinya kegiatan pelatihan dan penyuluhan tidak didukung oleh sebagian para pelaku usaha mikro.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan berasal dari pelaku usaha mikro adalah berasal dari para pelaku usaha mikro itu sendiri. Faktor pendukungnya adalah adanya keinginan para pelaku untuk diberdayakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Namun hanya sebagian para pelaku usaha mikro yang terdata yang diberdayakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Faktor penghambatnya adalah tidak semua kegiatan pemberdayaan yang diadakan Dinas dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro, seperti pelatihan dan penyuluhan. Artinya kegiatan pelatihan dan penyuluhan tidak didukung oleh sebagian para pelaku usaha mikro.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru sudah memenuhi aspek pemberdayaan yang baik, karena sudah adanya aspek enabling, empowering, dan melindungi. Aspek enabling diketahui dari adanya upaya pendataan potensi,

dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan mendata banyaknya jumlah usaha mikro yang ada dan usaha mikro yang berpotensi untuk diberdayakan. Kemudian aspek empowering diketahui dari adanya kegiatan membentuk kemitraan usaha, pemberdayaan kelembagaan usaha, koordinasi dan sinkronisasi para pelaku usaha mikro dengan para pemangku kepentingan daerah. Kemitraan usaha dilakukan dengan alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, peningkatan sumberdaya manusia, manajemen usaha, tata kelola usaha yang baik dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha. Pemberdayaan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat jaringan usaha mikro, dan koordinasi serta sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan setempat serta kemudahan perizinan bagi para pelaku usaha mikro. Sedangkan aspek melindungi adalah dengan perlindungan usaha mikro dari hal-hal merugikan akibat para pelaku usaha menengah dan besar melalui perlindungan hukum dan bantuan advokasi.

2. Faktor pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru diketahui dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, seperti terbatasnya anggaran untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro. Hal itu diketahui dari sedikitnya pelaku usaha mikro yang diberdayakan dibandingkan dengan para pelaku usaha mikro yang telah didata oleh dinas. Faktor eksternal berkaitan dengan para pelaku usaha mikronya, seperti keinginan untuk diberdayakan tetapi tidak diberdayakan oleh Dinas karena keterbatasan anggaran. Selain itu, sebagian para pelaku usaha mikro kurang mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas, karena dinilai kurang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamim, Sufian. 2018. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan (Suatu Konsep, Teori, dan Pendekatan)*. Pekanbaru: UIR Press.
- Keban, T. 2018. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Revisi*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Nyoto. 2018. *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Pekanbaru: UR Press.

- Pasolong, Harbani. 2018. Teori Administrasi Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2018. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.
- Riyanto, Adi. 2018. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Granit.
- Siagian, Sondang P. 2018. Teori & Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. Silalahi. 2018. Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi. Bandung: Unpar Press.
- Soetopo, Hendyat dan Soemanto, Wasti. 2018. Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan Edisi Revisi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2018. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafie, Inu Kencana. 2018. Manajemen Pemerintahan Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Syafri, Wirman. 2018. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga. Teguh, Ambar. 2018. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar, Husein. 2018. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, Eko Putro. 2018. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulkifli. 2019. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.

Jurnal / Skripsi

- Aina Florita, Jumiaty, dan Adil Mubarak. 2018. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 1, No. 1, 143 – 153.
- Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi. 2013. Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No. 2, 213 – 220.
- Oktaviani Yohandes. 2018. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015. Jurnal Online Mahasiswa FISIPOL Universitas Riau, Vol. 5, No. 1, 1-15.
- Romauli. 2016. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Rengat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Publika Vol. 2, No.2, 216-233.
- Trin Antini. 2015. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Lokal (Studi Terhadap Pemberdayaan UMKM Batik di Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Vol. 3, No. 10.